



## LITERASI TATA KELOLA BUMDES DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI KETERCAPAIAN SDGs DESA JENGGALA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Enis Tasia<sup>1</sup>, Rr. Sri Pancawati Martiningsih<sup>2</sup>, Victoria Kusumaningtyas Priyambodo<sup>3</sup>,  
Jaka Anggara<sup>4</sup>, Nungki Kartikasari<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia  
\*email (nungkikartikasari@unram.ac.id)

**Abstrak:** Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para masyarakat khususnya perangkat Bumdes tentang (a) Konsep dan Definisi SDG's; (b) Peranan bumdes dalam mewujudkan SDG's Desa; (c) Perencanaan tata kelola untuk mewujudkan SDG's; Untuk mencapai tujuan tersebut, solusi yang dilakukan telah dilakukan kegiatan penyampaian informasi kepada pengelola Bumdes dan perwakilan masyarakat. Metode penyampaian dilakukan dengan ceramah dan diskusi. Secara umum, kegiatan ini berjalan baik dan berhasil. Hal ini dapat diketahui melalui pemahaman materi yang disampaikan. Perangkat Bumdes dan masyarakat juga telah memahami hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian SDGs Desa Jenggala. Berdasarkan kegiatan ini, Bumdes menyadari bahwa peranannya dalam tata Kelola Bumdes yang baik dapat meningkatkan pencapaian SDGs Desa Jenggala.

**Kata Kunci:** Tata Kelola, Bumdes, SDGs Desa

**Abstract:** *This Community Service Activities aim to provide understanding and knowledge to the community, especially Bumdes officials, regarding (a) SDG's Concepts and Definitions; (b) The role of budes in realizing Village SDGs; (c) Governance planning to realize SDG's; To achieve this goal, the solution has been to provide information to Bumdes managers and community representatives. The delivery method is by lecture and discussion. In general, this activity went well and was successful. This can be known through understanding the material presented. Bumdes officials and the community also understand what can be done to increase the achievement of the Jenggala Village SDGs. Based on this activity, Bumdes realizes that its role in good Bumdes governance can increase the achievement of the Jenggala Village SDGs.*

**Keywords:** *Governance, Bumdes, Village SDGs*

Received	Revised	Published
30 Agustus 2023	18 September 2023	20 September 2023

### Pendahuluan

Pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78(1), dinyatakan bahwa pembangunan desa, diasumsikan peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Dalam perkembangan berikutnya, pembangunan berkelanjutan di desa mulai disinergikan dengan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB. Dengan demikian, penerapan SDGs Desa, diharapkan mendukung pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Oleh karena itu, identitas desa seharusnya adalah *self-governing community* dimana desa mampu melaksanakan secara mandiri terkait perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Bumdes merupakan salah satu entitas desa yang diharapkan dapat menjadi kontributor pembangunan desa. Pengelolaan yang baik atas Bumdes diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian desa dan pengelolaan potensi desa. Walaupun demikian, pengelolaan Bumdes di Indonesia pada umumnya belum dilakukan dengan optimal (Arindhawati dan Utami, 2020).

SDGs Desa merupakan upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Diketahui bahwa Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki perhatian lebih terhadap SDGs Desa. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Kabupaten Lombok Utara sebagai *pilot project* SDGs Desa untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) ([www.terasdesa.co.id](http://www.terasdesa.co.id), 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan keselarasan tujuan Bumdes dengan SDGs Desa. Urgensi penyelarasan ini diharapkan akan berdampak pada pencapaian SDGs Desa secara menyeluruh.

27 dari 43 Bumdes di Kabupaten Lombok Utara telah terverifikasi oleh Kementerian PDPTT (<https://data.ntbprov.go.id>). 5 diantara 27 Bumdes tersebut telah memiliki Bank Sampah, salah satunya adalah Bumdes Bahtera Mandiri yang berada di Desa Jenggala. Bumdes tersebut didirikan pada tahun 2018 memiliki tiga unit usaha yang terdiri dari tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R), unit wisata kolam Tiu Bangket, dan unit klinik pertanian. Unit-unit usaha ini sangat terkait dengan SDGs Desa.

Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan menyatakan ada 6 prinsip tata kelola Bumdes. Prinsip tersebut terdiri atas kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan *sustainable*. Prinsip tata kelola BUMDes sangat berperan dalam rangka mewujudkan SDGs desa. Hal ini yang menginisiasi tim kegiatan pengabdian untuk melaksanakan literasi terkait tata Kelola BUMdes untuk meningkatkan SDGs Desa.

Kegiatan Pengabdian yang berusaha dilakukan adalah pengenalan mengenai tata kelola BUMDes agar SDGs Desa dapat tercapai. Terdapat indikasi bahwa prinsip tata kelola BUMDes belum diselaraskan dengan 18 tujuan SDGs Desa yang telah ditetapkan secara nasional. Oleh karena itu tim pengabdian berusaha melakukan literasi terkait tata Kelola Bumdes, SDGs Desa dan penyelarannya. Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan Bumdes dapat menjadi lebih optimal dan dapat membantu ketercapaian SDGs Desa Jenggala di Kabupaten Lombok Utara.

## **Metode**

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi tatakelola BUMDes adalah melalui penyampaian materi dengan kelompok sasaran pengelola BUMDes. Kegiatan ini terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yang dilakukan adalah pengenalan. Pada fase ini dilakukan pengenalan tim pengabdian dan wawancara untuk memetakan tingkat literasi keuangan & tatakelola Bumdes. Fase kedua dilakukan dengan pengembangan indikator-indikator tatakelola yang paling sesuai dengan karakteristik BUMDes dengan 6 dimensi yaitu

(1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bumdes tersebut. Fase ketiga adalah diskusi lebih lanjut terkait pengembangan tata Kelola di masa yang akan datang serta kemampuan pengurus Bumdes untuk melaksanakan tata Kelola yang telah diselaraskan untuk mencapai SDGs Desa.



### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengabdian dapat diketahui bahwa secara umum sudah terdapat peran BUMDes Bahtera Mandiri dalam rangka mewujudkan SDGs desa walaupun tidak signifikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi, SDGs desa pada desa Jenggala sudah menyentuh beberapa tujuan SDGs Desa diantaranya adalah desa tanpa kemiskinan, pertumbuhan ekonomi desa merata, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, desa peduli lingkungan darat, dan desa damai

berkeadilan. Desa Jenggala menunjukkan bahwa 9 dari 18 SDGs desa berusaha diwujudkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis awal kondisi Desa dan Bumdes, tim pengabdian memberikan saran dan masukan terkait usaha pencapaian SDGs DESa melalui tata Kelola Bumdes. Pencapaian tata kelola yang baik memerlukan adanya enam prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan Bumdes tersebut. Adapun enam prinsip tersebut adalah kooperatif, partisipatif, mansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut potensi pengelolaan Bumdes yang dapat dilakukan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* desa ditunjukkan melalui :

1. Penciptaan peluang pekerjaan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa. Hal ini merupakan langkah positif untuk dalam mencapai SDG terkait dengan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja (SDGs 1 dan 8).
2. Pendidikan dan investasi sosial mendukung SDGs terkait pendidikan berkualitas (SDGs 4). Bumdes melakukan pengalokasian dana 5% dari pendapatan untuk Pendidikan. Hal ini merupakan perwujudan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa.
3. Manajemen sampah dan lingkungan untuk mendukung SDG terkait air bersih dan sanitasi (SDGs 6), energi terbarukan (SDGs 7), kota berkelanjutan (SDGs 11), dan pelestarian ekosistem darat dan perairan (SDGs 15). Bumdes berupaya untuk pengelolaan sampah yang efektif. Bumdes telah mengurangi masalah sampah dan meningkatkan kesehatan serta kenyamanan di desa.
4. Keterlibatan perempuan dilakukan BUMDes untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDGs 5).
5. Partisipasi masyarakat terkait kegiatan BUMDes untuk mendukung SDG terkait dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang efektif (SDG 16).

Potensi pengelolaan Bumdes dalam rangka pencapaian SDGs Desa ini disampaikan kepada para pengurus Bumdes dan perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar pengelolaan Bumdes di Desa tersebut menjadi lebih baik. Tanggapan pihak Bumdes dan BPD juga mendukung dan berusaha mengupayakan kerangka acuan untuk mencapai potensi maksimal SDGs Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara.

## **Kesimpulan**

Bumdes Bahtera Mandiri yang berada di Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara menerima dengan baik kerangka acuan dalam rangka pemaksimalan potensi SDGs desa yang disampaikan oleh tim pengabdian. Para pengelola dan perwakilan masyarakat menyadari bahwa Bumdes tidak boleh hanya berfokus pada laba, namun juga kebermanfaatannya bagi lingkungan dan masyarakat Desa di sekitarnya. Lebih lanjut terkait penerapan prinsip dan tata kelola BUMDes, pengelola menyatakan perlu dilakukan peningkatan. Utamanya terkait sistem akuntansi berbasis komputer dan sumber daya manusia. Selain untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya, hal ini juga dapat membantu mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa. Hal ini dapat menginisiasi keberlanjutan kegiatan pengabdian di Bumdes tersebut.

## Referensi

- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020b). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- <https://terasdesa.co.id/mendes-pdt-iningin-lombok-utara-jadi-percontohan-sdgs-desadi-ntb/> diakses pada 22 September 2023.
- <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-badan-usaha-milik-desamenurut-kabupaten-se-ntb/resource/a245e193-57d4-4c97-a43c> diakses pada 23 September 2023.